

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN,
KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN
LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE**
*(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan
Tahun Pengamatan 2010-2014)*

Ayu Feranika¹⁾, Mukhzarudfa²⁾, Tona Aurora L³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*

^{2&3)}*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the ownership institutional, independent directors, quality audit, the committee audit, executive character and leverage of the tax avoidance at the companies listed in the Indonesia Stock Exchange Period 2010-2014. The population in this study is a manufacturing company in BEI. The sampling technique using purposive sampling. The data analysis technique used is by using multiple regression. Statistical hypothesis testing using the F and statistical test t. The results showed that : (1) the ownership institutional, independent directors, quality audit, the committee audit, executive character and leverage simultaneously on tax avoidance, (2) ownership institutional effect on tax avoidance, (3) independent directors effect on tax avoidance, (4) quality audit affect on tax avoidance , (5) committee audit not effect on tax avoidance, (6) executive character affect on tax avoidance, (7) leverage not effect on tax avoidance.

Keywords : Ownership institutional, independent directors, quality audit, the committee audit, executive character, leverag and tax avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di BEI. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik F dan uji statistik t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance, (2) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, (3) dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance, (4) kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance, (5) komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. (6) karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. (7) leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata Kunci : Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, leverage, dan tax avoidance.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena yang penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia yang harus dikelola dengan baik. (Swingly dan I Made, 2015). Fenomena mengenai pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat besar. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2014 yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut :

Tabel. 1
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	2011	2012	2013	2014
Efektivitas Pemungutan Pajak	99,4%	96,4%	93,8%	91,5%
Target	Rp 879 Triliun	Rp 1016 Triliun	Rp 1048 Triliun	Rp 1072 Triliun
Terealisasi	Rp 874 Triliun	Rp 981 Triliun	Rp 981 Triliun	Rp 981,9 Triliun

Sumber: www.economy.okezone.com

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dewi dan I Ketut, 2014 mengemukakan bahwa bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Akibatnya perusahaan menjadi cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Kejadian ini dapat terjadi jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak, dalam prakteknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak pernah terjadi salah satunya, pada Amazon dan Google dan perusahaan raksasa di Eropa. Google pada tahun 2011 hanya membayar pajak 3,2% dari total pendapatannya, padahal sebagian besar pendapatannya itu berasal dari Eropa, dimana rata-rata tarif pajak perusahaan di sana adalah 26% sampai 34%. Google berhasil menghindari pajak sebesar \$ 2 miliar dengan mentransfer \$ 9,8 miliar pendapatannya ke Negara yang bebas pajak. Amazon Inggris pada tahun 2011

berhasil mendapatkan laba sebelum pajak sebesar £ 74 juta, tapi hanya membayar pajak £ 1,8 juta, padahal tarif pajak di Inggris adalah sebesar 35%. Amazon berhasil menghindari pajak di Inggris dengan menaruh kantor pusat Eropanya di negara Luxemburg yang merupakan surga pajak. (www.pajak.go.id)

Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu 3 negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan kondisi riil penerimaan negara perpajakan selama 4 tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pencapaian penerimaan perpajakan dari tahun 2011 sampai 2014 menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak pernah mencapai 100 persen penerimaan pajak. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Maria (2015) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit serta komite audit. Faktor yang juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu karakter eksekutif dan leverage. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *tax avoidance*, dilakukan oleh Swingly dan I Made, 2015 pada perusahaan manufaktur periode 2011-2013 yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini karakter eksekutif memiliki pengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan jumlah komite tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kurniasih (2013) dan Prakoso (2014), menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan I ketut (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel lain yang memiliki hasil signifikan yaitu resiko perusahaan dan kualitas audit, sedangkan

ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris masing-masing tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah karakter eksekutif berpengaruh *tax avoidance* ?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Kepemilikan Institusional (X₁)

Ngadiman dan Christiany (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Dewi dan I Ketut (2014), mendukung bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

2.2 Dewan Komisaris Independen (X₂)

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Annisa, 2012). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka

pengawasan manajemen akan semakin ketat. (Sari, 2014).

Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi. (Pohan, 2008).

2.3 Kualitas Audit (X₃)

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Damayanti dan Tridhahus, 2015).

2.4 Komite Audit (X₄)

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Alat pengukuran penelitian ini yang digunakan yaitu jumlah anggota komite audit, semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Chen et al, 2010).

2.5 Karakter Eksekutif (X₅)

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Dewi dan I Ketut, 2014). Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse*

akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, dapat disimpulkan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Low, 2009; Carolina *et al.* 2014).

2.6 Leverage (X₆)

Leverage didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva. *Leverage* juga didefinisikan sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. (Sari, 2014).

2.7 Tax Avoidance (Y)

Balter mengemukakan penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Herry, 2010).

3. HIPOTESIS PENELITIAN

- H₁ : Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan *leverage* diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H₂ : Kepemilikan Institusional diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₃ : Dewan Komisaris Independen diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₄ : Kualitas Audit diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₅ : Komite Audit diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₆ : Karakter Eksekutif diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₇ : *Leverage* diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. METODE PENELITIAN

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen dimana akan menarik beberapa kesimpulan (Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler, 2006). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode waktu 2010-2014. Jumlah populasi penelitian ini yaitu 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (www.idx.co.id).

Sampel adalah bagian dari populasi target yang dipilih secara cermat untuk mewakili populasi itu (Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler, 2006). Teknik sampel yang digunakan adalah dengan *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Berikut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 2
Proses Purposive Sampling Penelitian

No	Purposive Sampling	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-2014.	(143)
2.	Perusahaan manufaktur yang selama tahun penelitian 2010-2014 mengalami delisted	(2)
3.	Perusahaan yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2010-2014.	(59)
4.	Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang asing selama tahun penelitian 2010-2014.	(19)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data mengenai variabel penelitian, selama tahun penelitian 2010-2014.	(20)
Jumlah sampel		43
Total Observasi Penelitian 2010-2014		215

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

4.1 Operasional Variabel

1. Kepemilikan Institusional/KEI (X₁)

Persentase Kepemilikan Institusional menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KEI = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

2. Dewan Komisaris Independen/DKI (X₂)

Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEL.

$$DKI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

3. Kualitas Audit/KUA (X₃)

Variabel kualitas audit menggunakan variabel *dummy*. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4, maka diberikan nilai 0. KAP big-four yang digunakan dalam penelitian ini adalah : *Price Water House Coopers (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International, Ernst and Young (EY)*.

4. Komite Audit/KOA (X₄)

Dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen et al, 2010).

5. Karakter Eksekutif/KAE (X₅)

Paligorova (2010), Dyreng et al (2010), mengukur karakter eksekutif dengan *corporate risk* yang menggunakan EBIT (*earning before income tax*) dibagi dengan total aset perusahaan. Tingginya rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecenderungan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*. Berikut rumus yang digunakan :

$$\text{Risk} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Asset}}$$

6. Leverage/LV(X₆)

Leverage diukur dengan *total debt to assets ratio* dengan rumus sebagai berikut : Debt to assets Ratio, dengan rumus (Ngadiman dan Christiany, 2014) :

$$\text{DER} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

7. Tax Avoidance/TAV(Y)

Model estimasi pengukuran *Tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

4.2 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui program *SPSS 19.0 for Windows*. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{TAV} = \alpha + b_1\text{KEI} + b_2\text{DKI} + b_3\text{KUA} + b_4\text{KOA} + b_5\text{KAE} + b_6\text{LEV} + \varepsilon$$

4.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji f (uji simultan) dan t (uji parsial).

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis

Tabel. 3
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	,191	,263	
KEI_X1	-,328	,158	-,147
DKI_X2	,670	,264	,181
KUA_X3	-,161	,064	-,191
KOA_X4	,027	,067	,028
KAE_X5	,380	,188	,150
LEV_X6	-,112	,094	-,084

a. Dependent Variable: TAV_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

$$Y = 0,191 - 0,328X_1 + 0,670X_2 - 0,161X_3 + 0,027X_4 + 0,380X_5 - 0,112X_6$$

Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Konstanta sebesar 0,191 memberikan arti bahwa apabila nilai kepemilikan institusional (X₁), dewan komisaris independen (X₂), kualitas audit (X₃), komite audit (X₄), karakter eksekutif (X₅), leverage (X₆) diasumsikan = 0, maka tax avoidance (Y) secara konstan bernilai 0,191. Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X₁) sebesar -0,328 artinya hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan kepemilikan institusional maka akan terjadi penurunan tax avoidance sebesar -0,328, dan begitu juga sebaliknya. Koefisien regresi variabel dewan komisaris independen (X₂) sebesar 0,670 artinya hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan dewan komisaris independen maka akan terjadi peningkatan tax avoidance sebesar 0,670, dan begitu juga sebaliknya. Koefisien regresi variabel kualitas audit (X₃) sebesar -0,161 artinya hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan kualitas audit maka akan terjadi penurunan tax avoidance sebesar -0,161, dan begitu juga sebaliknya. Koefisien regresi variabel komite audit (X₄) sebesar 0,027 artinya hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu

satuan komite audit maka akan terjadi peningkatan tax avoidance sebesar 0,027, dan begitu juga sebaliknya.

Koefisien regresi variabel karakter eksekutif (X_5) sebesar 0,380 artinya hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan karakter eksekutif maka akan terjadi peningkatan tax avoidance sebesar 0,380, dan begitu juga sebaliknya. Koefisien regresi variabel leverage (X_6) sebesar -0,112 artinya hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan karakter eksekutif maka akan terjadi penurunan tax avoidance sebesar -0,112, dan begitu juga sebaliknya.

Tabel. 4
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,913	6	,485	3,134	,006 ^a
Residual	32,219	208	,155		
Total	35,132	214			

a. Predictors: (Constant), LEV_X6, KEI_X1, KOA_X4, KAE_X5, DKL_X2, KUA_X3

b. Dependent Variabel: TAV_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3,134 dengan $p-value$ sebesar 0,006 < 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} (3,134 > 2,14). Dengan demikian H_0 ditolak dan menerima H_a . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : Nilai t variabel kepemilikan institusional (X_1) yaitu -1,971 ($-t_{tabel}$) < -2,077 ($-t_{hitung}$) dan berarah negatif. Level signifikansi variabel kepemilikan institusional (X_1) adalah sebesar 0,039 (< 0,05). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Nilai t variabel dewan komisaris independen (X_2) yaitu 1,971 (t_{tabel}) < 2,538 (t_{hitung}) dan berarah positif. Level signifikansi variabel dewan komisaris independen (X_2) adalah sebesar 0,012 (< 0,05). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

Nilai t variabel kualitas audit (X_3) yaitu -1,971 ($-t_{tabel}$) < -2,498 ($-t_{hitung}$) dan berarah negatif. Level signifikansi variabel kualitas audit (X_3) adalah sebesar 0,013 (< 0,05). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial kualitas audit berpengaruh terhadap tax

avoidance. Nilai t variabel komite audit (X_4) yaitu 1,971 (t_{tabel}) > 0,402 (t_{hitung}) dan berarah positif. Level signifikansi variabel komite audit (X_4) adalah sebesar 0,688 (> 0,05). Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Nilai t variabel karakter eksekutif (X_5) yaitu 1,971 (t_{tabel}) < 2,026 (t_{hitung}) dan berarah positif. Level signifikansi variabel karakter eksekutif (X_5) adalah sebesar 0,040 (< 0,05). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance.

Nilai t variabel leverage (X_6) yaitu -1,971 ($-t_{tabel}$) > -1,195 ($-t_{hitung}$) dan berarah negatif. Level signifikansi variabel leverage (X_6) adalah sebesar 0,23 (> 0,05). Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berikut tabel 4 :

Tabel. 5
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,727	,468
KEI_X1	-2,077	,039
DKI_X2	2,538	,012
KUA_X3	-2,498	,013
KOA_X4	,402	,688
KAE_X5	2,026	,044
LEV_X6	-1,195	,233

a. Dependent Variabel: TAV_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualotas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini ditunjukkan dengan level signifikansi variabel interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage sebesar 0,006 (<0,05) dan nilai F_{hitung} 3,134 (> 2,14 (F_{tabel})). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur dengan periode 2010-2014.

Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri. Menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer (berupa kompensasi), mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham, sedangkan perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Desai, at all. 2006).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan, dan pimpinan yang memiliki karakter yang berani mengambil resiko memiliki pengaruh adanya kegiatan tax avoidance atau penghindaran pajak. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*.

5.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.

Nilai $-1,971 (-t_{tabel}) < -2,077 (-t_{hitung})$ dan berarah negatif dengan level signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar $0,039 (< 0,05)$. Hal tersebut berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian Pranata, Puspa, dan Herawati (2013), penelitian Ngadiman dan Christiany (2014) yang juga membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

5.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance.

Nilai $1,971 (t_{tabel}) < 2,538 (t_{hitung})$ dan berarah positif. Level signifikansi variabel dewan komisaris independen (X_2) adalah sebesar $0,012 (< 0,05)$. Hal

tersebut berarti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi. (Winata, 2014). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmitasari (2015) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Begitu juga penelitian yang dilakukan winata (2014) yang menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

5.2.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance.

Jumlah $-1,971 (-t_{tabel}) < -2,498 (-t_{hitung})$ dan berarah negatif. Level signifikansi variabel kualitas audit (X_3) adalah sebesar $0,013 (< 0,05)$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Dewi dan I Ketut, 2014). Sebaliknya, semakin rendah kualitas audit maka dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Maharani dan Ketut Ali (2014) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini juga mendukung penelitian dari Winata (2014) dan penelitian Dewi dan I kettut (2014) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

5.2.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance.

Jumlah $1,971 (t_{tabel}) > 0,402 (t_{hitung})$ dan berarah positif. Level signifikansi variabel komite audit (X_4) adalah sebesar $0,688 (> 0,05)$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini bisa juga

disebabkan oleh cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite audit cenderung homogen atau tidak bervariasi sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel komite audit pada *tax avoidance*. Hasil penelitian memperkuat hasil penelitian Dewi dan Maria (2015) yang menemukan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

5.2.6 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance.

$1,971 (t_{tabel}) < 2,026 (t_{hitung})$ dan berarah positif, serta level signifikansi variabel karakter eksekutif (X_5) adalah sebesar 0,044 ($< 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dewi dan I ketut (2014) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

5.2.7 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance.

Nilai $-1,971 (-t_{tabel}) > -1,195 (-t_{hitung})$ dan berarah negatif. Level signifikansi variabel leverage (X_6) adalah sebesar 0,233 ($> 0,05$). Hal tersebut berarti bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang dirumuskan yaitu H_7 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ; Variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage secara simultan mempengaruhi *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap

tax avoidance. Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan, bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*, sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutan perusahaannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang ilegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara dan dapat membuat nama dan reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk di mata publik. Dan bagi penelitian selanjutnya, Diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih menangkap fenomena *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pada perusahaan non manufaktur, seperti perusahaan jasa, sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena saat ini perusahaan tersebut menjadi target sasaran pengawasan ketat Dirjen Pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. (2012) "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi & Auditing*. (8). hal. 123-136.
- Chen, K. P dan Chu, C. Y. C. 2010. *Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion*. *Rand Journal of Economics*.
- Cooper, Donald R., & Schindler, Pamela S. (2006). *Business research methods* (11th ed.). New York: Mc GrawHill/Irwin.
- Damayanti, dan Tridahus. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan, dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Manajemen*. Vol : 5, No : 2.
- Dewi, dan Maria. 2015. Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Riks, dan Corporate Governance, Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN ; 2302-8556.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maharani, dan Ketut. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur (2008-2012). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN : 2302-8556.
- Ngadiman, dan Christiany. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI tahun 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*. Vol ; XVII, No ; 03.
- Rahmithasari, 2015. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Swingly, dan I Made. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN ; 2302-8556.
- Winata, Fenny. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol ; 04, No ; 01.
- www.economy.okezone.com, diakses pada 23 Februari 2016.
- www.pajak.go.id, diakses pada 24 Februari 2016.